



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI  
DENGAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 5 September 2019
Waktu	: Pukul 16.00 WIB s.d 17.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	: H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.Gerindra)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: Orang dari 49 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Acara	: Penetapan RKA-K/L TA. 2020

**KESIMPULAN/ KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, tanggal 5 September 2019 dibuka pukul 17.15 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara: Penetapan RKA-K/L TA. 2020

~

6

## II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah melalui Menteri ESDM RI untuk melakukan revisi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah khususnya pasal 119 terkait belanja pegawai inspektur tambang dan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan pada kementerian ESDM RI.
2. Komisi VII DPR RI meminta BPK RI untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang disinyalir menjadi penyebab tidak optimalnya PNBP dari usaha pertambangan.
3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk mendorong efektivitas pengawasan penerimaan negara (PNBP) dengan melakukan pergeseran alokasi anggaran dari Ditjen Migas KESDM RI sebesar Rp 200 Miliar (Dua Ratus Miliar Rupiah) yang dialokasikan ke Ditjen Minerba KESDM RI dan pergeseran sebesar Rp 100 Miliar dari Ditjen EBTKE kepada Itjen KESDM RI.
4. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI terkait pergeseran alokasi anggaran internal Ditjen Migas sebesar Rp 100 Miliar (Seratus Miliar Rupiah) untuk alokasi anggaran peningkatan pengawasan distribusi tabung LPG 3 Kg bersubsidi.
5. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM terkait pergeseran alokasi anggaran dari Ditjen Migas KESDM RI sebesar Rp 125 miliar (Seratus Dua Puluh Lima Miliar) kepada Badan Geologi KESDM RI untuk program tambahan Sumur Bor sebanyak 250 titik.
6. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM terkait pergeseran alokasi anggaran dari Ditjen Migas KESDM RI sebesar Rp 20 Miliar (Dua Puluh Miliar Rupiah) kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
7. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI bersama jajarannya untuk melakukan koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam menentukan waktu, lokasi dan penerima program dari Kementerian ESDM sesuai dengan daerah pemilihan Anggota Komisi VII DPR RI.
8. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI mendukung sepenuhnya pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah di bawah kewenangan Kementerian ESDM.

2

6

9. Adapun perincian anggaran tiap unit sebagai berikut :

UNIT	PROGRAM	Jumlah (Rp Milyar)
Setjen	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KESDM	414,5
Itjen	Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KESDM	189,7
Ditjen Migas	Pengelolaan dan Penyediaan Migas	4.116,0
Ditjen Gatrik	Pengelolaan Ketenagalistrikan	133,9
Ditjen Minerba	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	642,9
Setjen DEN	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan tugas teknis lainnya DEN	53,0
Balitbang	Penelitian dan Pengembangan Kemen ESDM	575,0 *)
BPSDM	Pengembangan SDM Kemen ESDM	776,2
Bageol	Penelitian, Mitigasi & Pelayanan Geologi	1.045,9
BPH Migas	Pengaturan & Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM & Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	249,7
Ditjen EBTKE	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	1.389,6
BPMA	Program Pengelolaan Migas Aceh	80,0
	<b>TOTAL</b>	<b>9.666,3</b>

\*) Termasuk jenis belanja Badan Layanan Umum sebesar Rp280.000.000.000, termasuk *multiyears contract* pengadaan kapal Geomarine sebesar Rp76.500.000.000 (tahap I dari total sebesar Rp150.000.000.000)

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.50 WIB

**MENTERI ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**



**IGNASIVS JONAN**

Jakarta, 5 September 2019  
**KETUA RAPAT,**



**H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak, MM, CA**